



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

| | | | |
|----------|---|---|------------------|
| Nomor | : | B/7869/KSP.00/70-76/11/2025 | 28 November 2025 |
| Sifat | : | Segera | |
| Lampiran | : | Dua berkas | |
| Hal | : | Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus Bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya | |

Yth. Daftar Terlampir
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Dalam rangka Program Pemberantasan Korupsi di Wilayah Papua Barat Daya, Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK akan melaksanakan kegiatan Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana agenda terlampir. Untuk itu mohon kehadiran dan kerjasamanya agar pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Ardan Fitra di nomor telepon 021-25578300 ext. 7467 atau nomor HP 085320606953 atau email ardan.fitra@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Plh. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Dokumen ini ditandatangani secara digital

Imam Turmudhi

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran 1

Surat Nomor: B/7869/KSP.00/70-

76/11/2025

Tanggal : 28 November 2025

Daftar Tujuan Surat

1. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua
2. Anggota BPP/ BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya
4. Kepala BPS Provinsi Papua Barat, dan Kabupaten/ Kota se-Papua Barat Daya

Provinsi Papua Barat Daya

1. Gubernur
2. Ketua DPRP
3. Ketua MRP
4. Ketua Fraksi Otsus DPRP
5. Sekretaris Daerah
6. Forkopimda
7. Inspektur
8. Kepala Bappeda
9. Kepala BPKADKepala Dinas PUPR
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Dukcapil
13. Kepala UKPBJ

Kabupaten/ Kota se-Papua Barat Daya

1. Bupati/ Wali Kota
2. Ketua DPRK
3. Sekretaris Daerah
4. Inspektur
5. Kepala Bappeda
6. Kepala BPKAD
7. Kepala Dinas PUPR
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Kepala Dinas Dukcapil
11. Kepala UKPBJ

a.n. Pimpinan

Plh. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
Komisi Pemberantasan Korupsi



Imam Turmudhi

Lampiran 2

Surat Nomor : B/7869/KSP.00/70-
76/11/2025

Tanggal : 28 November 2025

**Agenda Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus
Bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya
Selasa-Kamis, 16-18 Desember 2025**

| Hari, tanggal | Waktu (WIT) | Agenda | Tempat | Peserta |
|--------------------------------|------------------------|---|--|---|
| Selasa, 16 Desember 2025 | 09.00- 09.30 | Acara Pembukaan oleh Gubernur Papua Barat Daya | Hotel Aston Sorong Jl. Basuki Rahmat KM 7,5, Kel. Malaingkedi; Kec. Malaimsimsa, Sorong, 98412 | 1. Gubernur, Bupati/ Wali Kota 2. Ketua DPRP dan DPRK 3. Ketua Fraksi Otsus DPRP 4. Anggota BPP/ BP3OKP dan Ketua Pokja 5. Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 6. Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya 7. Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten/ Kota 8. Kepala BPKAD Provinsi, Kabupaten/ Kota 9. Inspektor Provinsi, Kabupaten/ Kota 10. Kepala Dinas PUPR Provinsi, Kab/ Kota 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/ Kota 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/ Kota 13. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kab/ Kota |
| | 09.30- 09.45 | Coffee Break | | |
| | 09.45- 12.00 | Diskusi Panel “Membangun Sinergi: Konsolidasi dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Dana Otonomi Khusus Papua yang Lebih Akuntabel dan Berdampak” dengan Pembicara: 1. Bpk Dian Patria, Direktorat Korsup V Kedeputian Korsup KPK 2. Bpk Sutarto, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan RI 3. Bpk Zulfakar, Koordinator Wilayah Papua, Kementerian PPN/ Bappenas | | |

| | | | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | <p>4. Bpk Otto Ihalaauw, Anggota BPP/ BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya</p> <p>5. Bpk Velix Vernando Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua</p> | | <p>14. Kepala UKPBJ Provinsi, Kab/ Kota</p> <p>15. Kementerian Keuangan</p> <p>16. Kementerian PPN/ Bappenas</p> |
| | 12.00-13.30 | Istirahat Makan Siang | | |
| | 13.30-16.30 | <p>Memperkuat Sistem Pengawasan Tata Kelola Otonomi Khusus Papua, serta Penindakan dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Pembicara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bpk Herie Purwanto, Direktorat Korsup V Kedeputian Korsup KPK 2. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya 3. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---|---|---|
| Rabu, 17 Desember 2025 | 08.30-12.00 | Diskusi Identifikasi Pokok Permasalahan Tata Kelola Dana Otsus di Setiap Pemerintah Daerah di Papua Barat Daya, serta Perumusan Upaya Perbaikan yang Solutif. Fasilitator oleh GIZ, KPK, Kemenkeu, Kementerian PPN/ Bappenas, BPKP, dan BPP/BP3OKP | Hotel Aston Sorong | 1. Gubernur, Bupati/ Walikota 2. Ketua DPRP dan DPRK 3. Ketua Fraksi Otsus DPRP 4. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris MRP 5. Anggota BP3OKP dan Ketua Pokja 6. Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota 7. Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya 8. Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten/ Kota 9. Kepala BPKAD Provinsi, Kabupaten/ Kota 10. Inspektur Provinsi, Kabupaten/ Kota 11. Kepala Dinas PUPR Provinsi, Kab/ Kota 12. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/ Kota 13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/ Kota 14. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kab/ Kota 15. Kepala UKPBJ Provinsi, Kab/ Kota 16. Kementerian Keuangan 17. Kementerian PPN/ Bappenas |
| | 12.00-13.30 | Istirahat Makan Siang | | |
| | 13.30-17.00 | Kunjungan Lapangan Proyek Pembangunan Infrastruktur dengan menggunakan Dana Otsus | Lokasi Proyek Pembangunan dengan Dana Otsus | 1. Pemda Provinsi PBD 2. KPK 3. Kemenkeu 4. Kementerian PPN/ Bappenas 5. BPKP 6. BPP/BP3OKP 7. Ketua Fraksi Otsus DPRP 8. Masyarakat |
| Kamis, 18 | 09.00- | Rapat Koordinasi Percepatan Perdasus | Hotel Aston | 1. Anggota BPP/ BP3OKP |

| | | | | |
|------------------|-----------------|--|--------|--|
| Desember 2025 | 12.00 | OAP, Pendataan dan Perekaman Kependudukan di Papua Barat Daya | Sorong | 2. Kepala BPS Provinsi, Kabupaten/ Kota 3. Ketua Fraksi Otsus DPRP 4. Inspektur Provinsi 5. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi, Kab/Kota 6. Kepala Biro Hukum Provinsi 7. KPK |
| | 13.30- 16.00 | Diskusi Media “Optimalisasi Tata Kelola Dana Otsus Papua Barat Daya: Menjawab Tantangan, Meraih Harapan:” Narasumber: 1. KPK 2. BPKP 3. BP3OKP 4. Ketua Fraksi Otsus DPRP 5. Inspektur Papua Barat Daya | | 1. Biro Humas 2. Media 3. Masyarakat |

a.n. Pimpinan
 Plh. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
 Komisi Pemberantasan Korupsi



*Dokumen ini ditandatangani secara digital
 Imam Turmudhi*